

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) merupakan salah satu industri yang mendukung perekonomian di Indonesia. Artikel yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian pada tanggal 6 Februari 2020, industri TPT mengalami pertumbuhan sebanyak 15,35% pada tahun 2019 dan juga mendukung kegiatan ekspor Indonesia sebesar USD 12,9 miliar. Persaingan antar perusahaan tekstil yang cukup tinggi, oleh karena itu perusahaan memerlukan suatu sistem yang mampu mendukung perusahaan untuk bertahan dalam pasar yang kompetitif dan menjaga serta meningkatkan kinerjanya.

Sistem perusahaan umumnya bergantung pada kebutuhan dan tujuan perusahaan, disesuaikan juga dengan proses bisnis dan lingkungan perusahaan tersebut, dan hal-hal lain yang berpengaruh terhadap sistem. Sistem merupakan prosedur-prosedur yang membentuk suatu jaringan kerja, yang secara bersama-sama dilakukan untuk mencapai sasaran tertentu (Jogiyanto, 2005:1). Sistem diterapkan oleh perusahaan dengan harapan bahwa sistem tersebut dapat membantu perusahaan dalam mencegah dan mengecilkan tingkat risiko dalam setiap aktivitas perusahaan dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari kinerja perusahaan. Suatu sistem disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perusahaan, sehingga semakin besar perusahaan pada umumnya semakin kompleks juga sistem atas aktivitas bisnis di perusahaan tersebut. Sistem yang terlalu kompleks dalam perusahaan umumnya meningkatkan risiko kesalahan yang mungkin terjadi saat para karyawan menjalankan aktivitasnya, dan kesalahan tersebut dapat memberikan dampak yang kurang baik bagi perusahaan. Untuk itu maka diperlukan pengendalian internal yang baik dalam suatu perusahaan.

Pengendalian internal merupakan salah satu cara bagi perusahaan untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa perusahaan dapat mencapai tujuan dari dilaksanakannya suatu pengendalian dengan menerapkan beberapa kebijakan dan

prosedur (Romney dan Steinbart, 2018:224). Pengendalian internal dirancang dan diterapkan oleh perusahaan dengan harapan bahwa pengendalian internal mampu mempertahankan kinerja operasional tetap efisien dan efektif, serta mampu mencegah dan meminimalkan tingkat risiko kesalahan. Pengendalian internal juga memiliki komponen-komponen yang menyusunnya, salah satunya ialah aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian sendiri terdiri atas berbagai aturan serta aktivitas yang dilakukan untuk menjamin bahwa pengendalian internal yang diterapkan dapat mendukung perusahaan mencapai tujuannya. Menurut Krismiaji (2010:227) aktivitas pengendalian terdiri atas 5 (lima) aktivitas, yaitu (1) otorisasi memadai atas transaksi dan aktivitas, (2) adanya pemisahan tugas, (3) terdapat dokumentasi yang layak, (4) penggunaan dan akses terhadap catatan dan aset terlindungi dengan baik, dan (5) verifikasi independen.

Salah satu langkah yang dilakukan perusahaan untuk mendukung terbentuknya pengendalian internal yang baik adalah dengan menerapkan suatu prosedur kerja yang membantu karyawan melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya atau biasanya disebut sebagai *Standard Operating Procedure* (SOP) atau juga Prosedur Operasional Standar (POS). POS merupakan suatu pedoman atau petunjuk yang diterapkan perusahaan untuk memastikan bahwa karyawan perusahaan melaksanakan kegiatan operasional dengan lancar (Sailendra, 2015:11).

Seiring berkembangnya jaman, POS menjadi hal yang umum bagi setiap perusahaan, mulai dari perusahaan kecil, menengah, hingga besar pasti memiliki suatu prosedur kerja yang disampaikan secara tertulis dan atau secara lisan. POS perusahaan dapat singkat maupun panjang. POS harus dapat memberikan penjelasan bagi pengguna terkait suatu siklus di perusahaan dan juga menjadi dasar acuan bagi karyawan untuk melakukan aktivitas pekerjaannya. POS bisa menjelaskan semua prosedur di perusahaan, mulai dari siklus pembelian, siklus penjualan, siklus penggajian, siklus produksi, hingga siklus keuangan. Dengan adanya POS dapat memudahkan karyawan dalam melakukan kegiatan operasional perusahaan sehingga kinerja karyawan dapat lebih efisien karena pekerjaan karyawan lebih terstruktur dan jelas, dan apabila POS perusahaan baik maka dapat juga meningkatkan pengendalian internal perusahaan untuk mengurangi risiko

kesalahan, baik kesalahan yang disengaja maupun tidak. Karena POS merupakan suatu acuan yang penting bagi perusahaan, maka POS tersebut haruslah tertulis dalam format yang mudah dibaca, mengandung informasi yang jelas dan mudah dipahami. POS yang terlalu panjang dan banyak menggunakan kata-kata akan susah untuk dipahami oleh pengguna, oleh karena itu POS sebaiknya dalam bentuk gambar dan menggunakan kata-kata singkat yang dapat menjelaskan dengan jelas apa yang dimaksudkan. POS juga harus relevan dengan kondisi saat ini, jadi apa bila terdapat perubahan dalam suatu prosedur, maka POS tersebut juga harus di-*update* atau diperbaiki.

Objek dari penelitian adalah PT. PMT, perusahaan ini bergerak dalam bidang manufaktur tekstil dan memiliki spesialisasi pada produk *mop yarn*. PT. PMT mulai berdiri sejak tanggal 7 April 2003 dan terletak di Jl. Raya Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Perusahaan menggunakan limbah-limbah kain untuk diproduksi menjadi 3 (tiga) jenis produk utama, yaitu *shoody product*, *mop yarn product*, dan *open end yarn*. PMT memasarkan produknya ke dalam dan juga luar negeri dan perusahaan tetap berkomitmen untuk menjadi perusahaan yang memiliki nama yang kuat dalam memproduksi *mop yarn* dan *blanket yarn*. Perusahaan telah membuat Prosedur Operasional Standar (POS) sejak tahun 2017 dan berlaku hingga saat ini, dimana setiap aktivitas perusahaan telah memiliki POS yang memudahkan karyawan melakukan kegiatan dan tanggung jawab pekerjaannya, salah satunya POS terkait *procurement*. Untuk proses produksinya, perusahaan membeli bahan baku menggunakan 2 cara pembelian yaitu menggunakan *supplier* perorangan (berasal dari karang taruna, organisasi-organisasi kecil non-formal, maupun *supplier* lain selain pabrik) dan *supplier* pabrik. Selain membeli bahan baku, perusahaan juga memerlukan persediaan non-bahan baku, seperti *spare part*, bahan bakar, bahan packing, perawatan mesin, dan barang lainnya yang termasuk non-bahan baku, yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional utama perusahaan. Pada penelitian yang dilakukan akan berfokus pada pembelian persediaan non-bahan baku, yang dimana terdiri atas pencarian *vendor* baru (hanya berlaku hingga nominal pembelian tertentu), pemrosesan order pembelian non-

bahan baku, proses penerimaan bahan baku, proses pembayarannya, dan proses retur.

Permasalahan yang pertama adalah tidak adanya dokumen yang mendasari *supervisor purchasing* NBB memasukkan *vendor* baru ke *database* perusahaan. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya *vendor* baru yang tidak memenuhi kualifikasi perusahaan terutama untuk pembelian persediaan non-bahan baku yang nilai transaksinya besar. Dengan adanya formulir pendaftaran *database vendor* baru yaitu untuk memastikan bahwa *vendor-vendor* yang ada dalam *database* perusahaan telah memenuhi kualifikasi dan telah disetujui oleh *general manager* sehingga dapat meminimalkan risiko adanya *vendor* bermasalah dan tidak mampu memenuhi pesanan pembelian yang dilakukan perusahaan.

Permasalahan yang kedua adalah sebelum memproses permintaan pengguna, tidak ada aktivitas pengecekan kembali persediaan NBB yang diminta pengguna. *Supervisor (SPV) purchasing* NBB hanya mengecek dokumen *purchase request* (PR) untuk memastikan bahwa jumlah yang diminta sesuai dengan kebutuhan perusahaan, spesifikasi yang diminta jelas, dan terdapat validasi dari atasan atau manajer. Hal tersebut menyebabkan terdapatnya persediaan yang diminta menumpuk di gudang, dan menyebabkan tidak efisiennya biaya yang dikeluarkan perusahaan.

Permasalahan yang ketiga adalah pada POS tahun 2017 perusahaan belum memiliki POS terkait penerimaan barang NBB sehingga aktivitas penerimaan yang dilakukan tidak memiliki aturan yang jelas. Tidak adanya POS yang mendasari aktivitas dalam perusahaan dapat menyebabkan kurang efektif dan efisien aktivitas yang dilakukan, dan juga dapat menimbulkan risiko kesalahan yang lebih besar bagi perusahaan dibandingkan apabila perusahaan menerapkan POS.

Permasalahan yang keempat adalah tidak adanya dokumen untuk retur barang. Jadi selama ini perusahaan hanya menandai barang yang tidak sesuai dengan *purchase order* (PO) di surat jalan atau nota yang diberikan *vendor*, kemudian akan dikembalikan. Setelah itu *staff purchasing* NBB akan menghubungi *vendor* dengan telepon, *e-mail*, atau media lainnya. Hal tersebut dapat menyebabkan tingginya risiko informasi yang salah terkait pencatatan jumlah hutang yang seharusnya

berkurang akibat retur barang dan juga risiko salah catat terkait jumlah barang yang diterima dan dikembalikan ke *vendor*.

Permasalahan terakhir adalah tidak relevannya Prosedur Operasional Standar (POS) yang dimiliki perusahaan dengan kondisi perusahaan sekarang sehingga perusahaan membutuhkan evaluasi ulang terkait POS-nya. Karena perusahaan ingin meningkatkan efektivitas dan efisiensi aktivitas yang dilakukan serta terdapat penambahan *supervisor purchasing* dalam struktur organisasi sehingga diperlukan peninjauan kembali POS dan dokumen yang sudah ada karena bisa terdapat ketidaksesuaian antara dokumen dengan POS yang telah diperbarui. Ketidaksesuaian POS tertulis dengan praktek dan dokumen pendukungnya dapat menyebabkan karyawan yang bersangkutan menjadi bingung dan kinerjanya kurang efisien, dimana hal tersebut bertentangan dengan tujuan perusahaan menerapkan POS. Dengan adanya pedoman operasional yang terstandarisasi dan jelas diharapkan dapat meningkatkan kinerja karyawan dan meminimalkan risiko kesalahan dalam praktek kerja sehari-hari. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan evaluasi kembali terkait POS agar sesuai dengan kondisi dan praktek yang dijalankan. Hal tersebut menjadi alasan juga bagi perusahaan untuk meminta bantuan dari pihak jurusan Akuntansi S1 Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala agar melakukan re-evaluasi terkait POS perusahaan yang sudah ada dan merancang kembali POS-nya agar lebih jelas sehingga mempermudah karyawannya menjalankan pekerjaannya.

Alasan lain perlu dilakukannya kegiatan re-evaluasi POS ini juga dikarenakan pada waktu dekat perusahaan berkeinginan untuk memperoleh sertifikasi ISO dari Organisasi Standardisasi Internasional. Dengan adanya sertifikasi ini, perusahaan akan memiliki nilai lebih dan memperkuat posisi perusahaan untuk bersaing di pasar internasional, dimana saat ini perusahaan sudah menjual produknya ke luar negeri juga. Hal tersebut karena perusahaan yang memiliki sertifikasi ISO berarti ada jaminan kualitas atas produk-produknya sehingga konsumen akan lebih tertarik dengan produk yang memiliki sertifikasi ISO, selain itu ISO juga dapat dijadikan sebagai standar acuan kerja karyawan sehingga karyawan dapat bekerja lebih optimal.

Dari permasalahan-permasalahan yang ditemukan, maka penelitian ini akan bertujuan untuk menganalisis dan merancang kembali POS yang dimiliki perusahaan terkait siklus pembelian persediaan non-bahan baku (NBB) sesuai dengan kondisi perusahaan. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan pengendalian internal untuk mengurangi terjadinya risiko kesalahan, dan mengevaluasi kembali sekaligus menyesuaikan POS yang ada dengan kondisi saat ini.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dibahas adalah “Bagaimana Analisis dan Perancangan Prosedur Operasional Standar (POS) Siklus Pembelian Persediaan Non-Bahan Baku pada PT. PMT? “

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk menganalisis Prosedur Operasional Standar (POS) lama serta memberikan saran untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada terkait POS pembelian persediaan Non-Bahan Baku (NBB) dalam rangka meningkatkan pengendalian internal perusahaan, dan juga mengevaluasi dan memperbaiki POS siklus pembelian persediaan NBB berdasarkan kondisi perusahaan sekarang.

## **1.4. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini memiliki ruang lingkup untuk menganalisis dan merancang kembali Prosedur Operasional Standar (POS) untuk siklus pembelian persediaan non-bahan baku, seperti *spare part*, bahan *packing*, alat tulis kantor, dan barang lainnya yang termasuk non-bahan baku (kecuali aset tetap dan jasa) di PT. PMT. POS yang dibahas ada 4, yaitu POS pencarian vendor baru, POS pembelian barang reguler, POS penerimaan barang NBB, dan POS retur barang NBB.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Akademis**

Sebagai pembanding dan penambah wawasan serta literatur ilmiah untuk melakukan penelitian selanjutnya yang memiliki topik serupa yaitu analisis dan perancangan Prosedur Operasional Standar (POS) pembelian persediaan non-bahan baku.

#### **2. Manfaat Praktis**

Dengan penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi PT. PMT untuk dapat mengatasi permasalahan-permasalahan serta kekurangan yang ada pada POS siklus pembelian persediaan non bahan-baku sehingga dapat mengurangi risiko dan peluang terjadinya kecurangan serta meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan. Serta membantu perusahaan dalam menyesuaikan POS yang ada dengan praktek terkini sehingga dapat membantu dalam proses pemerolehan sertifikasi ISO.

### **1.6. Sistematika Penulisan Skripsi**

#### **1. BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini membahas mengenai latar belakang dilakukannya penelitian berupa permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam POS siklus pembelian persediaan NBB di PT. PMT, kemudian apa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian, tujuan dari penelitian yang menjawab rumusan masalah yang ada, ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

#### **2. BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini membahas terkait teori-teori yang mendasari penelitian, teori yang dimaksud adalah sistem, sistem informasi, sistem informasi akuntansi, teknik pendokumentasian sistem, siklus pembelian, pengendalian internal, aktivitas pengendalian, dan Prosedur Operasional Standar (POS). Selain itu dalam bab

ini juga terdapat penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini, dan juga kerangka konseptual.

### 3. BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai desain penelitian, konsep operasional, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, dan analisis yang digunakan dalam penelitian untuk mengolah data.

### 4. BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan informasi umum terkait PT. PMT, struktur organisasi, POS perusahaan tahun 2017 terkait siklus pembelian persediaan NBB, dan dokumen-dokumen yang digunakan dalam POS tersebut. Kemudian membahas juga mengenai evaluasi kondisi terbaru yang dilakukan PT. PMT terkait siklus penelitian, setelah itu dilakukan evaluasi aktivitas pengendalian yang berdasarkan pada kondisi baru PT. PMT, evaluasi dokumen dan perbaikan dokumen dan dokumen baru yang diusulkan, evaluasi prosedur terhadap kondisi baru dan aktivitas pengendalian, evaluasi *job description*, dan rancangan POS baru. Rancangan POS baru terkait prosedur pencarian *vendor* baru, prosedur pembelian barang reguler, dan prosedur retur barang NBB.

### 5. BAB 5 SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian yang berisikan juga jawaban dari permasalahan yang ada dilatar belakang, keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian, dan saran untuk perusahaan terkait siklus pembelian persediaan NBB.